

Analysis Of The Financial Performance Of The Cilacap District Government For The 2018 - 2022 Fiscal Year

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018 – 2022

Faesal Agung Pujiono¹, Ibnu Dwi Santoso², Kumba Digdowiseiso³

Sekolah Pascasarjana, Universitas Nasional, Jakarta^{1,2,3}

kumba.digdo@civitas.unas.ac.id³

*Corresponding Author

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the financial performance of the regional government of Cilacap Regency for the 2018 – 2022 Fiscal Year using regional financial analysis. The research method used is descriptive quantitative. Analysis of the data used is to calculate the ratio of independence, effectiveness ratio, efficiency ratio, degree of decentralization ratio and the ratio of direct and indirect spending activities. The results of the study show that the ratio of regional financial independence in Cilacap Regency from 2018-2020 has a pattern of instructive relationships with very low financial capabilities, while from 2021-2022 it shows a pattern of consultative relationships with low financial capabilities. The effectiveness ratio shows very effective with an average effectiveness ratio of 105.94%. The efficiency ratio shows a tendency to decrease in efficiency, where in 2018-2020 the efficiency ratio is still below 100% which means it is less efficient, but in 2021-2022 it increases to above 100% which means it is becoming inefficient. The ratio of the degree of decentralization of Cilacap Regency is in an unfavorable position, while the ratio of indirect spending activities to total spending is more dominant or prioritized compared to direct spending activities. The conclusion from the research on financial analysis for the regional government of Cilacap Regency still needs to be improved because it is still not optimal and the pattern of relationships is still below expectations.

Keywords: Ratio Analysis; Local Government; Financial Performance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap tahun Anggaran 2018 – 2022 menggunakan analisis keuangan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Analisis data yang digunakan adalah dengan menghitung rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio derajat desentralisasi dan rasio aktivitas belanja langsung dan tidak langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Cilacap dari tahun 2018-2020 mempunyai pola hubungan instruktif dengan kemampuan keuangan rendah sekali, sementara dari tahun 2021-2022 menunjukkan pola hubungan konsultatif dengan kemampuan keuangan rendah. Rasio efektivitas menunjukkan sangat efektif dengan rata-rata angka rasio efektivitas sebesar 105,94%. Rasio efisiensi menunjukkan kecenderungan menurun tingkat efisiensinya, dimana pada tahun 2018-2020 rasio efisiensinya masih dibawah 100% yang berarti kurang efisien, namun pada tahun 2021-2022 meningkat menjadi di atas 100% yang berarti menjadi tidak efisien. Rasio derajat desentralisasi Kabupaten Cilacap berada pada posisi kurang baik, sedangkan rasio aktivitas belanja tidak langsung terhadap total belanja lebih dominan atau lebih diprioritaskan dibandingkan dengan aktivitas belanja langsung. Kesimpulan dari penelitian analisis keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap masih perlu ditingkatkan lagi karena masih belum optimal dan pola hubungan yang masih dibawah harapan.

Kata Kunci: Analisis Rasio, Pemerintah Daerah, Kinerja Keuangan

1. Pendahuluan

Perubahan paradigma pembangunan di Indonesia tidak lepas dari perubahan pendekatan pembangunan dari sentralisasi ke desentralisasi, yang berdampak pada munculnya

otonomi daerah sebagai sistem pendekatan pembangunan yang bertujuan mendekatkan masyarakat pada proses pembangunan yang lebih dirasakan bersama. untuk mencapai kesejahteraan lebih cepat.

Penerapan otonomi daerah dimulai setelah terjadinya reformasi pada tahun 1998 yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan akhirnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam bidang ekonomi, otonomi daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu pemerintah daerah diberikan kebebasan dalam mengelola keuangan agar pemerataan pendapatan tercapai, hal ini dilakukan karena pemerintah pusat berpendapat bahwa pemerintah daerah lebih memahami akan kebutuhan daerahnya, sehingga pembangunan ekonomi masyarakat di daerah dapat cepat tercapai dan tepat sasaran.

Pemerataan pembangunan di daerah dapat dicapai jika adanya tatakelola yang baik atau *good governance*. Tanpa penerapan prinsip-prinsip *good governance* akan sangat sulit tercapai. Salah satunya adanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah diharapkan akan dapat menghasilkan kinerja pembangunan di daerah yang lebih efektif dan efisien.

Menurut Mardiasmo (2002), reformasi pengelolaan keuangan daerah diawali dengan adanya tuntutan terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sector publik. Reformasi manajemen sector publik harus dan sangat ditentukan oleh reformasi di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Permendagri No. 77 Tahun 2020 menerangkan jika semua pendapatan dan pengeluaran daerah harus didokumentasikan dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, membuka kesempatan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran, mendistribusikan sumber daya regional serta untuk meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi keuangan daerah.

Beberapa penelitian atau kajian tentang analisis keuangan daerah telah dilakukan diantaranya oleh Digdowiseiso dan Alfian (2023) tentang Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2017 – 2021 yang menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah Kabupaten Bima tahun 2017-2021, dilihat dari Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bima menunjukkan bahwa pelaksanaan pajak dan retribusi daerah dominan berada di tingkat rendah (dibawah 100%) atau tidak efektif. Berdasarkan perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bima Tahun 2017-2021, pola hubungannya adalah seluruhnya Instruktif dengan keuangan rendah sekali Rasio derajat desentralisasi Kabupaten Bima tahun 2017-2021 relatif berada di kemampuan Kurang Baik dan Tidak Baik. Rasio Aktivitas menunjukkan bahwa rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja masih lebih besar ketimbang rasio belanja langsung terhadap total belanja, Kesimpulan dari analisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bima tahun 2017-2021 belum berjalan optimal seperti yang diharapkan. Pada penelitian Zuhri, M., & Soleh, A. (2016) tentang Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur tahun 2011-2014 jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong rendah sekali (rata-rata 2,44% per tahun). Rasio Efektivitas PAD diketahui bahwa efektivitas PAD Kabupaten Kaur tahun 2011, 2013 dan 2014 berjalan Kurang Efektif yang ditunjukkan dengan nilai rasio antara 75%-89%, namun pada tahun 2012 berjalan sangat efektif dengan nilai rasio mencapai 107,3%. Rasio Aktivitas dari sisi Rasio Belanja Operasi tergolong baik yakni dengan nilai rasio antara 50%-100% atau dengan nilai rata-rata 76,7% per tahun sedangkan Rasio Belanja Modal tergolong tidak baik karena memiliki nilai rasio kurang dari 50% atau dengan nilai rata-rata pertahun sebesar 23,2% per tahun. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kaur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun

pertumbuhan tersebut tergolong pertumbuhan sedang dengan nilai rata-rata pertahun sebesar 45,22% per tahun.

Penelitian yang dilakukan Fitrianingrum (2017) tentang Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemda Kabupaten Bantul Tahun 2014 – 2016 menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Kabupaten Bantul dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah diantara 25-50% masing tergolong rendah dan dalam pola hubungan konsultatif. Rasio efektivitas PAD dapat dikategorikan efektif, rasio efisiensi keuangan daerah tergolong kurang efisien, rasio keserasian dapat dikatakan bahwa Pemda Kabupaten Bantul mengalokasikan lebih dominan pada belanja operasional disbanding belanja modal serta rasio pertumbuhan pendapatan daerah yang terjadi pada pemerintah Kabupaten Bantul untuk tahun 2016 mengalami penurunan yang signifikan.

Ruang lingkup keuangan daerah sendiri merupakan kegiatan dalam pengelolaan keuangan di suatu daerah yang meliputi proses perencanaan, proses penatausahaan, proses pelaksanaan, proses pelaporan, proses pengawasan, hingga pertanggungjawaban. Dengan mengetahui suatu daerah dalam pengelolaannya maka dapat memberikan masukan dalam penentuan kebijakan pengelolaan keuangannya sehingga lebih tepat guna, efektif dan efisien. Untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan melakukan analisis rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi dan rasio belanja langsung serta belanja tidak langsung terhadap total belanja.

Kabupaten Cilacap sebagai kabupaten terluas di Provinsi Jawa Tengah harus dapat menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan keuangannya, karena akan berdampak pada pembangunan ekonominya. Dengan pengelolaan keuangan yang baik diharapkan dapat disusun kebijakan yang sesuai sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

2. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah dengan pendekatan metode deskripsi kuantitatif. Penelitian mengambil data sekunder dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap sebagai pengelola keuangan di Kabupaten Cilacap serta PPID Kabupaten Cilacap sebagai pengelola informasi dan dokumentasi publik di Kabupaten Cilacap. Penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2012) adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel, atau lebih independen tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel lain. Lebih lanjut disebutkan jika penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu pengumpulan data menggunakan instrumen riset, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sehingga penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena, peristiwa, gejala dan kejadian yang terjadi secara factual, sistematis serta akurat. Fenomena dapat berupa bentuk, aktivitas, hubungan, karakteristik serta persamaan maupun perbedaan antar fenomena.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mengambil data dari sumber terpercaya yaitu BPPKAD dan PPID Kabupaten Cilacap. Data berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2018-2022 dan data yang diambil dalam Kabupaten Cilacap Dalam Angka yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Cilacap. Kemudian data-data tersebut dilakukan analisis.

Teknis analisis datanya melalui penghitungan rumus yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui kinerja keuangan Kabupaten Cilacap akan dilakukan dengan menghitung rasio efektivitas, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi serta rasio aktivitas belanja langsung dan belanja tidak langsung. Tahapan pengukuran tersebut sesuai dengan yang

dikemukakan oleh Digdowiseiso (2022); Digdowiseiso & Satrio (2022); Digdowiseiso, K. Murshed, S.M., & Bergh, S.I (2022a;2022b).

3. Hasil Dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap

Tabel 1. Realisasi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022

Kode Akun	Uraian	Realisasi Pendapatan dan Belanja (Rupiah)				
		2018	2019	2020	2021	2022
4	PENDAPATAN DAERAH	3.072.112.464.787,47	3.282.797.966.310,59	3.152.402.455.712,48	3.334.300.290.655,79	3.293.132.139.343,02
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	527.577.740.281,47	574.276.795.303,59	591.343.787.160,48	739.133.833.863,79	700.428.762.449,02
4.1.1	Pajak Daerah	185.943.092.741,00	209.475.848.896,00	203.188.563.271,00	221.377.109.179,00	280.277.331.102,00
4.1.2	Retribusi Daerah	43.486.837.366,00	44.740.277.398,00	18.969.873.119,00	18.619.623.089,00	19.813.134.112,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.455.692.469,00	26.190.072.040,00	44.675.178.661,00	56.112.553.448,00	57.360.003.796,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	279.692.117.705,47	293.870.596.969,59	324.510.172.109,48	443.024.548.147,79	342.978.293.439,02
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.169.394.243.854,00	2.517.433.595.490,00	2.346.223.145.232,00	2.403.370.709.951,00	2.563.412.247.062,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.142.297.605.332,00	2.261.990.669.164,00	2.123.408.420.654,00	2.137.587.242.274,00	2.286.284.520.504,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	1.874.260.346.332,00	1.928.670.863.364,00	1.757.591.202.654,00	1.787.763.401.074,00	1.954.167.356.400,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	27.250.000.000,00	46.363.857.000,00	71.923.322.000,00	50.399.460.000,00	23.352.408.000,00
4.2.1.5	Dana Desa	240.787.259.000,00	286.955.948.800,00	293.893.896.000,00	299.424.381.200,00	308.764.756.104,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.096.638.522,00	255.442.926.326,00	222.814.724.578,00	265.783.467.677,00	277.127.726.558,00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil		222.481.485.326,00	197.463.851.578,00	247.068.593.170,00	263.877.289.558,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	27.096.638.522,00	32.961.441.000,00	25.350.873.000,00	18.714.874.507,00	13.250.437.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YAG SAH	375.140.480.652,00	191.087.575.517,00	214.835.523.320,00	191.795.746.841,00	29.291.129.832,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	169.833.448.395,00	191.087.575.517,00	214.835.523.320,00	17.642.977.025,00	29.291.129.832,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	205.307.032.257,00			174.152.769.816,00	-
5	BELANJADAERAH	2.985.422.839.102,00	3.283.321.137.886,20	3.088.834.820.260,00	3.329.814.716.679,80	3.402.035.620.730,27
5.1	BELANJA OPERASI	2.434.551.928.596,00	2.116.419.108.705,00	2.118.332.170.798,00	2.210.981.437.441,80	2.320.737.241.789,27
5.1.1	Belanja Pegawai	1.172.462.907.533,00	1.193.972.479.225,00	1.145.443.814.425,00	1.216.467.089.074,00	1.276.549.760.531,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	766.451.579.063,00	857.565.629.480,00	881.429.804.126,00	896.942.503.674,00	927.982.437.486,27
5.1.4	Belanja Subsidi	399.972.000,00	400.000.000,00			
5.1.5	Belanja Hibah	39.773.038.500,00	58.596.950.000,00	40.366.842.247,00	91.467.844.693,00	110.755.993.772,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	9.382.418.000,00	5.884.050.000,00	51.091.710.000,00	6.104.000.000,00	5.449.050.000,00
5.1.7	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	19.061.703.000,00				
5.1.8	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	427.020.310.500,00				
5.2	BELANJA MODAL	550.840.750.506,00	663.321.198.006,20	462.431.933.784,00	583.816.848.983,00	537.110.858.819,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	15.447.495.006,00	6.643.748.180,00	14.242.054.652,00	2.879.943.857,00	3.763.063.239,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.006.079.713,00	108.096.788.800,00	108.580.137.022,00	135.811.712.711,00	119.231.474.138,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	119.318.775.206,00	134.459.038.713,00	63.032.862.639,00	117.320.453.265,00	128.439.041.222,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jangsan, dan Irigasi	300.227.610.376,00	391.540.159.364,00	264.551.341.345,00	320.292.686.547,00	276.909.438.414,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.727.490.205,00	21.576.305.349,20	11.867.458.126,00	6.467.884.903,00	8.767.841.806,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	113.300.000,00	1.005.157.600,00	158.080.000,00	1.044.167.700,00	-
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.160.000,00	-	26.975.323.078,00	4.935.080.670,00	4.204.295.318,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	30.160.000,00	-	26.975.323.078,00	4.935.080.670,00	4.204.295.318,00
5.4	BELANJA TRANSFER	503.580.831.175,00	481.095.392.600,00	481.095.392.600,00	530.081.349.585,00	539.983.224.804,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil		22.943.846.000,00	21.470.790.300,00	22.190.613.115,00	23.312.112.400,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan		480.636.985.175,00	459.624.602.300,00	507.890.736.470,00	516.671.112.404,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	86.689.625.685	- 523.171.576	63.567.635.452	4.485.573.976	- 108.903.481.387,25
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	221.474.491.947,46	302.164.117.632,93	280.865.946.057,32	324.581.581.509,80	314.067.155.485,79
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	221.474.491.947,46	302.164.117.632,93	280.865.946.057,32	324.581.581.509,80	314.067.155.485,79
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.000.000.000,00	20.775.000.000,00	19.852.000.000,00	15.000.000.000,00	19.500.000.000,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	6.000.000.000,00	20.775.000.000,00	19.852.000.000,00	15.000.000.000,00	19.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	215.474.491.947,46	281.389.117.632,93	261.013.946.057,32	309.581.581.509,80	294.567.155.485,79
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	302.164.117.632,93	280.865.946.057,32	324.581.581.509,80	314.067.155.485,79	185.663.674.098,54

Sumber: BPPKAD Kabupaten Cilacap

Berdasarkan tabel 1 di atas, realisasi pendapatan daerah pada tahun 2018-2022 terlihat fluktuatif.

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal yang bersumber dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah lain. Kemandirian keuangan

daerah menunjukkan kemampuan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan daerahnya sendiri (Abdul Halim, 2017:279).

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat+Provinsi+Pinjaman}} \times 100\%$$

Pola hubungan dan tingkat kemandirian daerah sebagai berikut :

Tabel 2. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	26 – 50	Konsultatif
Sedang	51 – 75	Partisipatif
Tinggi	76 – 100	Delegatif

Sumber : Mahmudi (2019:140)

Dari hasil perhitungan Rasio Kemandirian di Kabupaten Cilacap sebagai berikut :

Tabel 3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap 2018-2022

Tahun	PAD	Total Tranfer (Pendapatan Eksternal)	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan	Kemampuan Keuangan
2018	527.577.740.281,47	2.544.534.724.506,00	20,73	Instruktif	Rendah Sekali
2019	574.276.795.303,59	2.708.521.171.007,00	21,20	Instruktif	Rendah Sekali
2020	591.343.787.160,48	2.561.058.668.552,00	23,09	Instruktif	Rendah Sekali
2021	739.133.833.863,79	2.595.166.456.792,00	28,48	Konsultatif	Rendah
2022	700.428.762.449,02	2.592.703.376.894,00	27,02	Konsultatif	Rendah
Rata-Rata			24,10	Instruktif	Rendah Sekali

Sumber : Data diolah penulis, 2023

2. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap

Menurut Abdul Halim (2017:298), rasio efektivitas adalah kemampuan daerah untuk merealisasikan PAD sesuai dengan target yang telah ditentukan. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Kriteria dari hasil perhitungan rasio efektivitas keuangan daerah adalah sebagai berikut :

Table 4. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah

Presentase (%)	Kriteria
>100	Sangat Efektif
100	Efektif
90-99	Cukup Efektif
75-89	Kurang Efektif
<75	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2019:141)

Hasil dari perhitungan rasio efektivitas keuangan daerah di Kabupaten Cilacap sebagai berikut :

Table 5. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap 2018-2022

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Rasio Efektivitas (%)	Keterangan
2018	527.577.740.281,47	497.353.613.147,00	106,08	Sangat Efektif
2019	574.276.795.303,59	553.906.636.361,00	103,68	Sangat Efektif
2020	591.343.787.160,48	561.113.709.065,00	105,39	Sangat Efektif
2021	739.133.833.863,79	653.354.304.152,00	113,13	Sangat Efektif
2022	700.428.762.449,02	690.532.412.044,00	101,43	Sangat Efektif
Rata-Rata			105,94	Sangat Efektif

Sumber : Data diolah Penulis, 2023

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap

Rasio ini menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam mengefisienkan biaya yang dikeluarkan olehnya.

Rumus yang digunakan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Target Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria dari hasil perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
>100	Tidak Efisien
90 – 100	Kurang Efisien
80 – 90	Cukup Efisien
60 – 80	Efisien
<60	Sangat Efisien

Sumber: Kepmendagri Nomor 600.900.327 tahun 1996

Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 – 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Target Pendapatan Daerah	Rasio Efisiensi (%)	Keterangan
2018	2.985.422.839.102,00	3.049.351.736.008,00	97,90	Kurang Efisien
2019	3.283.321.137.886,20	3.289.004.349.418,00	99,83	Kurang Efisien
2020	3.088.834.820.260,00	3.183.974.378.680,00	97,01	Kurang Efisien
2021	3.329.814.716.679,80	3.233.576.105.032,00	102,98	Tidak Efisien
2022	3.402.035.620.730,27	3.297.814.435.223,00	103,16	Tidak Efisien
Rata-Rata			100,18	Tidak Efisien

Sumber : Data diolah penulis, 2023

4. Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Cilacap

Rasio derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2016). Rumus yang digunakan sebagai berikut :

$$\text{Rasio derajat desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Table 8. Kriteria Derajat Desentralisasi

Rasio Derajat Desentralisasi (%)	Kriteria
>50	Sangat Baik
25 – 50	Baik
10 – 25	Kurang Baik
<10	Tidak Baik

Sumber : Halim (2007)

Hasil perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut:

Table 9. Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022

Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio Derajat Desentralisasi (%)	Pola Hubungan
2018	527.577.740.281,47	3.072.112.464.787,47	17,17	Kurang Baik
2019	574.276.795.303,59	3.282.797.966.310,59	17,49	Kurang Baik
2020	591.343.787.160,48	3.152.402.455.712,48	18,76	Kurang Baik
2021	739.133.833.863,79	3.334.300.290.655,79	22,17	Kurang Baik
2022	700.428.762.449,02	3.293.132.139.343,02	21,27	Kurang Baik
Rata-Rata			19,37	Kurang Baik

Sumber : Data diolah penulis, 2023

5. Rasio Aktivitas Keuangan Kabupaten Cilacap

Rasio aktivitas keuangan terdiri dari rasio belanja langsung terhadap total belanja daerah serta rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah.

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Rasio Belanja Langsung

$$\text{Rasio Belanja Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2. Rasio Belanja Tidak Langsung

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan rasio belanja langsung dan rasio belanja tidak langsung kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :

Table 10. Rasio Belanja Langsung Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022

Tahun	Total Belanja Langsung	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Langsung Terhadap Total Belanja (%)
2018	1.317.292.329.569,00	2.985.422.839.102,00	44,12
2019	1.520.886.827.486,20	3.283.321.137.886,20	46,32
2020	1.343.861.737.910,00	3.088.834.820.260,00	43,51
2021	1.480.759.352.657,80	3.329.814.716.679,80	44,47
2022	1.465.093.296.305,27	3.402.035.620.730,27	43,07
Rata-Rata			44,30

Sumber : Data diolah penulis, 2023

Tabel 11. Rasio Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022

Tahun	Total Belanja Tidak Langsung	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja (%)
2018	1.668.130.509.533,00	2.985.422.839.102,00	55,88
2019	1.762.434.310.400,00	3.283.321.137.886,20	53,68
2020	1.744.973.082.350,00	3.088.834.820.260,00	56,49
2021	1.849.055.364.022,00	3.329.814.716.679,80	55,53
2022	1.936.942.324.425,00	3.402.035.620.730,27	56,93
Rata-Rata			55,70

Sumber : Data diolah penulis, 2023

Table 12. Rasio Belanja Langsung dan Rasio Belanja Tidak Langsung Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2023

Tahun	Rasio Belanja Langsung Terhadap Total Belanja (%)	Rasio Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja (%)
2018	44,12	55,88
2019	46,32	53,68
2020	43,51	56,49
2021	44,47	55,53
2022	43,07	56,93
Rata-Rata	44,30	55,70

Sumber : Data diolah penulis, 2023

Pembahasan

1. Kabupaten Cilacap

Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten terluas di Provinsi Jawa Tengah dan juga merupakan salah satu lokasi Kawasan Industri Nasional. Luas wilayah Kabupaten Cilacap tercatat 225.361 Ha (termasuk Pulau Nusakambangan seluas 11.511 Ha). Secara geografis terletak diantara 108o 4" 30" – 109o 30" 30" Garis Bujur Timur dan 7o 30" - 7o 45" 20" Garis Lintang Selatan. Sedangkan secara topografi, Kabupaten Cilacap berada pada ketinggian antara 6 – 198 meter di atas permukaan laut. Di bagian selatan wilayah Kabupaten Cilacap yang membatasi Segara Anakan dan Samudra Hindia terdapat Pulau Nusakambangan yang memanjang dari arah barat ke timur dengan jarak kurang lebih 30 kilometer. Wilayah Kabupaten Cilacap mempunyai topografi yang beragam, namun kondisi topografi rata-rata merupakan dataran rendah.

Secara administratif Kabupaten Cilacap terbagi menjadi 24 kecamatan yang terdiri dari 269 desa dan 15 kelurahan. Luas yang ada terdiri dari 64.738 hektar (30,27 persen) lahan sawah, 106.575 hektar (49,84 persen) lahan bukan sawah dan 42.537 hektar (19,89 persen) lahan bukan pertanian. Kecamatan terluas adalah kecamatan Wanareja (18.973 hektar), sedangkan kecamatan terjauh dari ibu kota kabupaten adalah Kecamatan Dayeuhluhur (107 km).

2. Analisis Hasil Perhitungan

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022

Berdasarkan hasil perhitungan yang terdapat pada table 3 diperoleh data angka rasio kemandirian dari tahun 2018-2022 bervariasi dengan terdapat dua pola hubungan. Pola hubungan pertama adalah instruktif dengan kemampuan keuangan rendah sekali dan pola hubungan konsultatif dengan kemampuan keuangan yang rendah. Pola hubungan instruktif terjadi pada tahun 2018-2020 dengan nilai rasio kemandiriannya sebesar 20,73% di tahun 2018, 21,20% di tahun 2019 dan 23,09 % di tahun 2020. Pola hubungan instruktif artinya tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat masih sangat tinggi.

Untuk tahun 2021-2022 dengan angka rasio kemandirian sebesar 28,48% dan 27,02%, pola hubungannya sudah mengalami peningkatan menjadi konsultatif. Kategori konsultatif artinya campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi.

Jika dirata-rata selama lima tahun didapat angka rasio kemandirian sebesar 24,10% yang berarti selama lima tahun tersebut pola hubungannya masih instruktif. Kemandirian yang instruktif masih sangat jauh dari standarisasi keuangan daerah untuk benar-benar menuju kemandirian yang sebenarnya. Daerah masih sangat mengandalkan dana dari pemerintah pusat, yang artinya daerah belum bisa mengoptimalkan pendapatan asli daerah sehingga perlu dilakukan bermacam cara agar Kabupaten Cilacap dapat menggali lebih optimal pendapatan asli daerahnya.

b. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil analisis yang tertera pada table 5 didapat angka rasio efektivitasnya dari tahun 2018-2022 mencapai angka diatas 100% atau sangat efektif. Angka rasio efektivitas dari tahun 2018-2022 adalah 106,08%; 103,68%; 105,39%; 113,13%; dan 101,43% dengan rata-rata 105,94%. Angka tertinggi atau paling sangat efektif terjadi pada tahun 2021 dengan rasio kemandirian sebesar 113,13%.

Rasio efektivitas keuangan daerah menggambarkan kinerja keuangan daerah dalam hal kemampuannya mencapai target PAD yang telah ditetapkan. Semakin tinggi angka rasio efektivitasnya maka semakin tinggi pula pencapaian target PAD nya. Tahun 2021 bisa dikatakan jika usaha dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dalam pencapaian target PAD nya sangat optimal sampai saat ini yang ditandai dengan angka rasio efektivitasnya mencapai 113,13%.

c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisiensi menunjukkan kemampuan daerah yang semakin efisien dalam mengelola keuangannya.

Berdasarkan perhitungan yang terdapat pada table 7 didapatkan hasil rasio efisiensi keuangan yang cenderung mengalami penurunan keefisiensinya. Pada tahun 2018-2022 angka rasio efisiensinya adalah sebesar 97,90%; 99,83%; 97,01%; 102,98%; serta 103,16%. Dengan rata-rata sebesar 100,18% yang masuk kategori tidak efisien.

Pada tahun 2018 – 2020 angka rasio efisiensinya dibawah 100% dengan kategori kurang efisien namun pada tahun 2021-2022 malah mengalami kenaikan diatas 100% yang berarti semakin tidak efisien. Hal ini perlu mendapatkan perhatian agar jangan sampai semakin tinggi angkanya yang menunjukkan semakin tidak efisien dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan semakin tidak efisien menunjukkan jika dalam upaya meningkatkan pendapatannya pemerintah daerah Kabupaten Cilacap banyak melakukan sesuatu kegiatan yang kurang bermanfaat atau kurang mendukung peningkatan pencapaian pendapatan daerah.

d. Rasio Derajat Desentralisasi

Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi 2010:142). Semakin kecil angka rasio derajat desentralisasi menunjukkan semakin tidak baik atau semakin kecil kontribusi PAD terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Berdasarkan perhitungan yang terdapat pada table 9 didapatkan angka rasio derajat desentralisasi dari tahun 2018 – 2022 pada kategori kurang baik karena angkanya diantara 10 – 25 % yaitu secara berurutan 17,17%; 17,49%; 19,76%; 22,17% dan 21,27% dengan rata-rata selama lima tahun sebesar 19,37%.

e. Rasio Aktivitas Keuangan

Rasio aktivitas keuangan menunjukkan pemerintah daerah dalam memprioritaskan belanja daerahnya. Apakah lebih memprioritaskan pada belanja langsung atau belanja tidak langsung.

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Sedangkan Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan. Belanja langsung terdiri dari belanja modal dan belanja barang/jasa termasuk belanja pegawai (honorarium/upah). Sedangkan belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja bunga, belanja hibah&bansos, belanja subsidi serta belanja tidak terduga.

Berdasarkan perhitungan yang terdapat ditabel 12 diperoleh angka rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja masih lebih besar dibandingkan dengan rasio belanja langsung terhadap total belanja yaitu 55,70% berbanding 44,30% yang artinya pemerintah daerah Kabupaten Cilacap masih lebih memprioritaskan belanja tidak langsung dibandingkan dengan belanja langsung.

4. Penutup

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian dapat dijelaskan jika pengelolaan keuangan pemerintahan daerah Kabupaten Cilacap tahun 2018 – 2022 dilihat dari Rasio

Kemandiriannya masih masuk kategori rendah secara rata-rata sebesar 24,10%. Namun dilihat pertahunnya sudah mengalami peningkatan dari pola hubungan yang masih Instruktif pada tahun 2018 menjadi Konsultatif pada tahun 2022 dan secara kemampuan keuangannya juga mengalami peningkatan dari rendah sekali pada tahun 2018 menjadi rendah pada tahun 2022. Pada rasio efektivitas, Kabupaten Cilacap sudah menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang sangat efektif dengan angka rata-rata selama lima tahun tersebut diatas 100% yaitu 105,94%, dimana angka tertinggi dicapai pada tahun 2021 sebesar 113,13% yang namun sayangnya pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 101,43%. Rasio efisiensi menunjukkan angka diatas 100% secara rata-rata yaitu sebesar 100,18% yang artinya tidak efisien. Jika dilihat pertahun malah cenderung mengalami penurunan efisiensi yaitu dari tahun 2018-2020 angkanya masih dibawah 100% namun mengalami kenaikan diatas 100% pada tahun 2021 dan 2022. Hal ini perlu dicarikan solusi agar tidak semakin menurun tingkat efisiensinya yang bisa berdampak pada pengelolaan keuangan daerah. Dilihat dari rasio derajat desentralisasi menunjukkan jika pengelolaan keuangannya masih kurang baik karena menunjukkan rata-rata angka rasionya di 19,37%, artinya masih kurang baik dalam kemampuan desentralisasinya. Untuk rasio aktivitas menunjukkan jika pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dari tahun 2018-2022 masing lebih memprioritaskan pada belanja tidak langsung dibandingkan belanja langsung terhadap total belanja yang dilakukan.

engan demikian berdasarkan hasil analisa dan pembahasan diatas dapat disimpulkan jika pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Cilacap masih perlu ditingkatkan lagi karena masih belum optimal dan pola hubungan yang masih dibawah harapan.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim. (2017). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Digdowniseiso, K. (2022). *Is Fiscal Decentralization Growth Enhancing? Economies*, 10(3), 62.
- Digdowniseiso, K., & Satrio, M.B. (2022) *Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Keterbatasan Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Selatan*. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 4(Special Issue 3), 1170-1181.
- Digdowniseiso, K., Murshed, S.M., & Bergh, S.I. (2022). *How Effective is Fiscal Decentralization for Inequality Reduction in Developing Countries? Sustainability*, 14(1), 505.
- Digdowniseiso, K., Murshed, S.M., & Bergh, S.I. (2022). *What Drives Regional Proliferation in Indonesia? Assessing the Role of Institutions*. Lex Localis – Journal of Local Self-Government, 20(1).
- Digdowniseiso, K dan Alfian (2023), *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017 – 2021*, Jurnal Ilmiah Global Education 4 (1) (2023)
- Fitriningrum, Dina (2017), *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemda Kabupaten Bantul Tahun 2014-2016*. Tesis. Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta Tahun 2017.
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang *Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*
- Zuhri, M., & Soleh, A. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur*. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v4i2.284>